

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aaron, Thomas J., 1960. *The Control of Police Discretion*. Illinois, Charles, C. Thomas, Springfield.
- Allen, D. Emmers., Guy, R.F., and Edgley, C.K., 1980, *Social Psychology as Social Process*. California: Wodworth Inc.
- Amal, Ichlasul dan Armawi, Armaidy, 1996. *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arief, Barda Nawawi, 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Banurusman, 1995. *Polisi, Masyarakat dan Negara*. Yogyakarta: P.T. Bayu Indra Grafika.
- Boli Sabon, Max dkk, 1992, *Ilmu Negara, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Budihardjo, Eko, 1995. *Pendekatan Sistem Tata Ruang dan Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Budiarjo, Miriam, 1977. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Faal, M., 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: P.T. Paradnya Paramitha.
- Gautama, M.P., 2003. *Budaya Jawa dan Masyarakat Modern*. P2KTPW BPPT, Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Gautama, S., 1973. *Pengertian tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni.
- Glaser, Barney G., 1992. *Emergence vs Forcing: Basics of Grounded Theory Analysis*. Millvalley, CA : Sociology Press.
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). *Upper Echelons: the organization as a reflection of its top managers*. *Academy of Management Review*, 9(2). Greenwich, CT: JAI Press.
- Kelana, Momo, 1984, *Hukum Kepolisian*, Cetakan Keempat, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Kelsen, Hans, 2014. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Penerbit Nusamedia.

- Klandermans, Bert., 2005, *Protes dalam kajian psikologi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kota Yogyakarta, Bapedda, 2012. *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2012*. Yogyakarta: Bapedda.
- Kunarto dan Tabah, Anton, 1995, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, Klaten: CV. Sahabat.
- Lang, K. dan G.E. Lang, 1968. *Collective Behavior, International Encyclopaedia of the Social Sciences*. Crowell Collier and Macmillan, Inc.
- Lopa, Baharudin, 1987, *Permasalahan dan Penegakkan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mahfud MD, Mohammad, 2000, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Reneka Cipta.
- Majda, El Muhtaj 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Matulessy, Andik., 2003, *Gerakan Mahasiswa*. Malang: Wineka Media.
- Moelong, Lexi J., 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Undip Press.
- Nasari, Imron., 1993, *Mahasiswa dan Masa Depan Politik Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Offset.
- Notohamidjojo, O, 1970. *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Panggabean, R., dan Ali-Fauzi, I., 2014. *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: PUSAD Paramadina.
- Park, R.E., Burgess E.W., 1921. *Introduction to the Science of Sociology*. Chicago: Univ. of Chicago Press.
- Podgorecki, Adam, 1987. *Pendekatan sosiologi terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prakoso, Djoko, 1987. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: P.T. Bina Aksara.
- Radjab, Untung S., 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, Bandung: C.V. Utama.
- Rahardjo, S. 2002. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.

- Rahardjo, S., dan Tabah, A., 1993. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan, 2014. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1987, *Peranan Psikologi Dalam Rangka OP.Timalisasi dan Dinamisasi Tugas Polri (pidato Dies Natalis PTIK ke41)*, Jakarta: PTIK.
- _____, 1996, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sholichin Abdul Wahab, 1997, *Public Policy : Pengertian Pokok Untuk Memahami dan AnalisisKebijaksanaan Pemerintah*, Surabaya: Airlangga University.
- Sibarani, S.M., Solemanto, Ginting, S., Iwang, B., Prayoga, I., dan Ritonga, R. 2001. *Antara Kekuasaan Dan Profesionalisme*. Jakarta: P.T. Dharmapena Multimedia.
- Sighele, S. 1892. *La foule criminelle; Essai de psychologie collective*, Translated from the Italian by Paul Vigny. Paris: Felix Alcan.
- Simorangkir, J.C.T., 1980. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES.
- Smelser, N.J., 1962. *Theory of Collective Behavior*. New York: The Free Press.
- Soekanto, S., 1983. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S., 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunardi, R.M., 2004, *Pembinaan Ketahanan Bangsa Dalam Rangka Memperkokoh Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: P.T. Katernita Adidarma.
- _____, 2005, *Pembinaan Kebangsaan Indonesia, Dalam Rangka Menjaga Integritas Negara dan Pembentukan Jati Diri Bangsa*, Jakarta: P.T. Katernita Adidarma.
- Sunario, Mr., 1951, *Hak-Hak Manusia Internasional*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Suryosumarto, B., 2001. *Ketahanan Nasional Indonesia Penangkal Disintegrasi Bangsa dan Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Tabah, A. 1991. *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.

Tanuredjo, Budiman, 1999. *Pasung Kebebasan: Menelisik Kelahiran UU Unjuk Rasa*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Tesis, Jurnal dan Laporan

Asshiddiqie, Jimly, 2011, Gagasan Negara hukum Indonesia, *Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham RI, Jakarta

Azhari, F., 2003, Diskresi Polisi Negara Republik Indonesia dalam rangka Penegakan Hukum Pidana, *Tesis*: Universitas Diponegoro.

Bahri, Syaiful, 2002. Perubahan Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi, *Tesis*: Universitas Diponegoro.

BPS, 2013, *Statistik Politik dan Keamanan DIY 2013*, Biro Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Djamin, A. 2000. Pengembangan Sistem Manajemen Personel Polri Di Masa Depan. *Jurnal Polisi Indonesia*. Tahun 2. Halaman 47-54. Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia -Yayasan Obor Indonesia.

Febriyan, Syukri dan Aswanto, 2012, “Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian”, *Jurnal Hukum FH, Universitas Hasanudin*, halaman:1-12.

International Institute for Sustainable Development and Global Subsidies Initiative, 2014. Tinjauan Subsidi Energi di Indonesia. International Institute for Sustainable Development and Global Subsidies Initiative.

Kontras, 2012. Pemantauan Aksi Unjuk Rasa Menolak Kenaikan Harga BBM (Januari-Maret 2012), KontraS.

Lingkar Survei Indonesia, Agustus 2014. Harapan dan Ancaman Jokowi-JK. LSI, Agustus 2014.

Lingkar Survei Indonesia, November 2014. Jokowi Pasca Naiknya BBM. LSI, November 2014.

Prakoso, Abintoro, 2010. “Vage Normen sebagai Sumber Hukum Diskresi yang Belum Diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak”, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 2, hal. 249-270.

- Pranadji, T, 1995. Gejala Modernisasi dan Krisis Budaya pada Kegiatan Nelayan Tangkap. *Jurnal ANALISIS-CSIS*, XXIV (1):33-34, Center for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Prawira, P.Y., Djatmika, P., Sugiri, B., 2012, “Diskresi Kepolisian Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Polda Kalteng”, *Jurnal Hukum, FH Universitas Brawijaya, Malang, halaman:1-27*.
- Sage, L.A. 2005, Masyarakat adalah Ibu Kandung Polri. *Ombudsman. Edisi No. 68 / Tahun V / Juli 2005*. Halaman 58.
- Sayuti, 2011, “Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Volume 4, Nomor 2 hal 81-105*, Jambi.
- Schneider, Cathy Lisa, 2008. “Police Power and Race Riots in Paris”. *Politics and Society* 36 (1): 133-159.
- The World Bank, Desember 2014. *Indonesia Economic Quarterly: Membawa Perubahan*. The World Bank, Desember 2014, *hal:1-58*.
- Wildana, Dina Tsalist, 2012. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Melalui Alternative Dispute Resolution di Polsek Bantul (Studi terhadap Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga Berupa Kekerasan Fisik), *Tesis: Universitas Gadjah Mada*.

Peraturan Per Undang-undangan

- Republik Indonesia, Departemen Penerangan, 1999. *Undang-undang republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Republik Indonesia, Undang-Undang, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Sitompul, D.P.M, 2000. *Himpunan Perundang-Undangan Tahun 1998-1999 Untuk Penegak Hukum*, Jakarta: C.V. Wanthi Jaya.Kapolri, Peraturan, Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
- Kapolri, Peraturan, Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- Kapolri, Peraturan, Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Kapolri, Peraturan, Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Kapolri, Peraturan, Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Kapolri, Peraturan, Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Konstitusi, Mahkamah, 2014, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah.

Internet

<http://www.ombudsman.go.id>

<http://nasional.kompas.com>

www.jawapos.com

<http://m.liputan6.com>

<http://thelawdictionary.org>

<http://www.wikipedia.org>